

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sentralisasi kekuasaan dan keuangan negara pada masa sebelum era reformasi telah banyak memberikan pengalaman kepada masyarakat daerah atas ketimpangan yang terjadi mengenai pembagian hasil dan sumber daya alam antara daerah dan Jakarta. Hal ini mengakibatkan pergolakan-pergolakan di beberapa daerah untuk menuntut pemberlakuan otonomi khusus atau bahkan memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia sebagai rasa ketidakpuasan tersebut. Salah satu masalah penting yang menjadi penyebabnya adalah kurangnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah sebagai unsur dari suatu *Good Governance*.

Tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Memberikan wewenang yang besar kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki pemerintah daerah karenanya perlu menetapkan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban yang tepat untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang efisien, efektif dan transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi. Fenomena pengelolaan APBD saat ini besarnya tuntutan pelaksanaan

akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit-unit kerja pemerintah baik pusat maupun daerah. Pengelolaan keuangan APBD secara terbuka cepat dan tepat kepada masyarakat belum didapatkan, publik tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, masyarakat tidak dilibatkan dalam proses dan pembangunan pemerintah. Hal itu muncul karena banyaknya persoalan yang belum dapat diselesaikan.

Disamping itu Organisasi sektor publik membutuhkan akuntansi untuk mencatat, melaporkan dan mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan yang telah terjadi, dimana produk akhirnya berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005). Laporan keuangan yang dihasilkan tersebut akan memberikan informasi bagi pihak yang berkepentingan dalam pembuatan keputusan. Akuntansi di organisasi sektor publik bertujuan bagi manajer publik untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangan kepada *stakeholder*, tetapi permasalahan yang muncul dimasyarakat adalah meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelaksanaan akuntabilitas organisasi publik karena masyarakat beranggapan bahwa apa yang dilakukan pemerintah belum optimal. Tuntutan masyarakat ini terkait dengan transparansi dalam pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be information*), dan hak untuk didengar informasinya (*right to be heard and to be listened to*) (Mardiasmo,2009:17).

Sopannah dan wahyudi (2004) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD) kota Malang, diperoleh hasil dari berbagai hipotesis bahwa dari sample masyarakat, pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sampel dewan, pengetahuan anggaran juga berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Sementara sampel masyarakat interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel Dewan interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel masyarakat interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel Dewan interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Sampel masyarakat interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan. Sampel dewan, interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh secara signifikan.

Siregar (2011), melakukan penelitian yang berjudul pengaruh akuntabilitas publik dan pengawasan terhadap pengelolaan APBD dengan standar akuntansi pemerintah sebagai variabel moderating pada pemerintah kota pematang siantar. Dependen variabelnya adalah pengelolaan APBD, sedangkan variabel independennya adalah akuntabilitas publik, transparansi publik dan pengawasan dengan standar akuntansi publik sebagai moderatingnya. Dapat diperoleh hasil penelitiannya adalah akuntabilitas publik secara persial berpengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan APBD, sedangkan transparansi dan pengawasan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan APBD.

Arifin (2005) yang melakukan penelitian di Yogyakarta, dimana interaksi antara pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan public berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah.

Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan yang peneliti lakukan sekarang adalah, peneliti terdahulu menggunakan beberapa jenis variabel independen yang berbeda antara

yang satu dan yang lainnya sedangkan yang peneliti lakukan dengan menggabungkan beberapa variabel independen lain yang dianggap perlu.

Peneliti memakai variabel independen partisipasi masyarakat, akuntabilitas keuangan daerah, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi sedangkan variabel dependennya pengelolaan keuangan daerah, peneliti melakukan penelitian ini pada Pemerintah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, serta Efektivitas dan Efisiensi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang muncul adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap pengelolaan keuangan daerah ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah?
3. Apakah terdapat pengaruh partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah?
4. Apakah dengan diterapkannya undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 pengelolaan keuangan daerah telah terlaksana dengan baik?
5. Sejauh mana pengaruh efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah?
6. Apakah efektivitas dan efisiensi berpengaruh dalam pengelolaan keuangan daerah?
7. Apakah terdapat pengaruh transparansi terhadap pengelolaan keuangan daerah?

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahan pemahaman terhadap permasalahan yang akan di teliti, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembahasan penelitian ini. Oleh karena itu peneliti membatasi masalah hanya pada Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, serta Efektivitas dan Efisiensi terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk memudahkan penelitian ini agar memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan fakta, maka terlebih dahulu dirumuskan masalah yang akan diteliti. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang dikemukakan adalah Apakah Partisipasi, Akuntabilitas, Transparansi, serta Efektivitas dan Efisiensi berpengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas serta Efektivitas dan Efisiensi mempunyai pengaruh terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

1.6 Manfaat Penelitian

- 1) Secara subjektif, Sebagai kesempatan untuk mengkaji lebih dalam mengenai prinsip *Good Governance* diantaranya Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Efisiensi kaitannya dengan Pengelolaan Keuangan, serta penerapannya.
- 2) Secara praktis, Sebagai bahan masukan dalam pengelolaan keuangan daerah agar lebih akuntabel sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana yang berasal dari publik.
- 3) Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan memperkaya ragam penelitian yang telah dibuat oleh para mahasiswa bagi Jurusan Akuntansi Pemerintahan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan serta dapat menjadi bahan referensi bagi terciptanya suatu karya ilmiah.

